BAHASA DAN KEKUASAAN

Peranan Teks dan Konteks dalam Pemaknaan

Oleh Suroso

Pada pemerintahan Presiden Soeharto (1966-1998) yang lebih dikenal dengan rezim Orde Baru, pemerintah sat itu suka membuat kata-kata yang rancu pemaknaannya. Pembredelan Surat Kabar diganti dengan Penncabutan SIUPP (Surat Ijin Usaha Penerbitan Pers), pengusuran lahan oang misin diganti kata dengan penatan kembali. Korupsi di Mahkamah Agung diganti dengan Salah Prosedur. Bahkan tidak jarang penguasa waktu itu menggunakan eufemisme atau penghalusan makna bahasa sebagai alat memantapkan citra. Dengan klarifikasi yang diahkan, mereka mencoba merasionalkan penggunaan bahasa untuk kepentingan politik. Pada Pemilu Orde aru 1992, kata “LUBER” (Langsung, Umum, Bebas, dan Rahasia) digunakan dan masih harus dilengkapi dengan kata “Jurdil” (Jujur dan Adil). Namun faktanya, pemilu betul-betul tidak adil, menakutkan, dan diarahkan untuk memenangkan partai Golkar. Bahkan jika ada PNS yang memilih parai di luar Golkar akan mendapatkan sanksi. PNS pun dimobilisir untuk memenangkan partai Golkar, partai penguaa sat itu Jadi, kata yang diekspos Orde Baru bias makna.

Kata, istilah , ungkapan, politik yang diproduksi Orde baru pun, sampai saat ini masih digunakan misalnya pelecehan, penghinaan, subversif, pembahayakan kelangsungan hidup bangsa, keamanan terkendali, mencermarkan nama baik, pemerataan pembangunan, masyarakat prasejahtera (miskin) , lembaga pemasyarakatan (penjara), Tenaga Kerja Wanita atau PRT sebagai padanan “babu” atau perempuan yang bekerja sebagai pembantu (pelayan) di rumah tangga orang (KBBI, 2000:83). Penggunaan istilah TKW karena ekspor babu ke luar negeri dipandang mendatangkan devisa, terlepas kita dikenal sebagai bangsa babu.

**Teks dan Konteks**

Apapun makanannya, minumnya The Botol Sostro, Iklan kreatif yang total meniru dari Coca cola, Everything you eat, drink Coca Cola. Jadi, dalam menilai makna apa pun bahasa yang terujar pembaca wajib memahami teks dan konteksnya. Berbagai varian bahasa Indonesia muncul di berbagai media, khususnya wacana yang membujuk atau mempersuasi seperti bahasa iklan di Media Massa. Misalnya Talk less do More, Pria Punya Selera, Kesan Pertama begitu menggoda, setelah itu terserah anda, Fly with me, dll, sejatinya ingin mengajak pembaca mau membeli produk yang ditawarkan. Walaupun ada peringatan bahaya merokok dalam kemasan, namun orang tetap saja merokok. Anak kecil akan ketakutan ketika di pintu Garasi ada gambar anjing dan tulisan “Awas Ada Anjing Galak” tetapi maling akan tertawa. Peringatan seperti Awas Tegangan Tinggi, Mudah pecah, jangan dibanting, dan Kawasan bebas rokok, jam belajar masyarakat, apakah dengan kata-kata itu semua orng memahami dan melakukan petunjuk itu.

Teks dipandang sebagai ruang sosial, representasi pengalaman dan dunia interaksi sosial antarparisipan secara serempak terjadi. Sifat-sifat teks antara lain (1) terdiri atas makna-makna yang membentuk kesatuan makna, walaupun yang dituliskan dalam teks itu adalah deretan kata dan kalimat. Makna teks dikodekan dalam bentuk kata dan struktur. (2) Merupakan suatu bentuk pertukaran makna yang bersifat sosial. Setiap teks dalam suatu bahasa memiliki makna karena dihubungkan dengan interaksi antarpembaca. (3) Memiliki hubungan yang dekat dengan konteks. Orang tidak sanggup mengungkapkan salah satu konsep tanpa mengungkapkan yang lain. Dalam suatu teks ada yang menyertainya. Teks yang menyertai teks itu disebut konteks. Konteks yang dimaksud tidak hanya dilisankan tetapi juga berupa kejadian-kejadian nonverbal lain, yaitu keseluruhan teks. Konteks merupakan jembatan antara teks dan situasi teks itu betul-betul terjadi.

Hubungan konteks situasi dengan teks oleh Halliday dan Hassan (1985) dijelaskan dengan mengaitkan ciriciri konteks situasi yaitu medan wacana, pelibat wacana, dan sarana wacana dengan tiga fundamental teori semantik yaitu makna ideasional, atau makna pengalaman, makna interpersonal, dan makna tekstual. Jika diskemakan hubungan antara konteks situasi dan teks terlihat dalam tabel berikut

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Situasi ciri konteks | Diungkapkan Oleh | Teks: Unsur Fundamental Sistem Semantik |
| Medan Wacana (Hal yang berlangsung) |  | Makna Penalaman (Transitivitas Penamaan) |
| Pelibat Wacana (Orang yang ambil bagian) |  | Makna Antarpelibat (modus, modalitas, persona) |
| Sarana wacana (peran yang diberikan kepada bahasa) |  | Makna Tekstual (tema, informasi, hubungan kohesif) |

Konteks situasi yang dikemukakan di atas hanya merupakan lingkungan yang langsung dari teks. Masih terdapat lingkungan yang lebih luas yang harus diacu dalam menafsirkan teks, yaitu konteks budaya. Setiap konteks situasi yang sebenarnya, susunan medan tertentu, pelibat, dan sarana merupakan suatu keutuhan yang secara khas bergayut dalam suatu budaya (van Dijk, 1977)

Dalam suatu surat kabar misalnya, selalu memiliki konteks situasi (1) medan wacana) medan wacana berupa “berita apa”, (2) pelibat wacana berupa hubungan antara “penulis dan pembaca”, dan (3) sarana wacana berupa “pemberitaan”.

Konsep visi dan misi pers, peran dan kedudukan pemerintah dalam pers, struktur peran para jurnalis, penerbit, pembaca, dan sebagainya, semua merupakan faktor yang membentuk konteks budaya dan secara bersama-sama menentukan penafsiran teks dalam konteks situasinya.

**Bahasa dan Ideologi**

Bahasa dan ideologi tidak bisa dilepaskan dari konteks hubungan antara bahasa dan kekuasaan karena perilaku ideologi hanya dapat diamati dari praktik kekuasaan (Fairclouch, 1989). Hubungan antara bahasa dan kekuasaan mulai terjalin ketika Jean Baudrillard, Jurgen Habermas, dan Antonio Gramsci (dalam Latief, dan Ibrahim, 1995) mengemukakan gagasan mereka tentang bahasa dan kekuasaan. Baudrillard menyatakan bahwa “*The real monopholy is never that technical means, but of speech*”. Sedangkan Habermas memandang bahwa bahasa sebagai medium untuk menghubungkan sang subjek dengan tiga wilayah yaitu eksternal, sosial, dan wilayah dunia. Wilayah eksternal mengacu kepada situasi di luar masyarakat tempat subjek berada. Wilayah sosial mengacu kepada totalitas hubungan antarpribadi yang memiliki aturan normatif dalam masyarakat. Wilayah dunia mengacu pada maksud-maksud dan pengalaman subjektif penutur. Dengan demikian tidak berlebihan jika dalam konteks hubungan bahasa dengan tiga wilayah ini Habermas menyatakan bahwa “*language is also medium of domination of power”*.

Pengaruh dimensi eksternal dalam bahasa ini memunculkan istilah kekuatan (*force*) dan hegemoni (*hegemony*). Istilah kekuatan lebih ditafsirkan sebagai penggunaan daya paksa untuk membuat orang lain mentaati syarat-syarat suatu. Sedangkan Hegemoni diartikan sebagai “kepatuhan aktif” dari kelompok-kelompok yang didominasi oleh kelas yang berkuasa melalui penggunaan kepemimpinan intelektual, moral, politik yang termanifestasi kan dalam bentuk-bentuk kooptasi institusional dan manipulasi sistematis atas teks dan tafsirnya (Simpson, 1993) (Patria, 1998)

Konsolidasi kekuasan pada era Soeharto dilakukan dengan cara (1) penghalusan konsep yang bersentuan dengan kekuasaan. Penghalusan itu disengaja untuk melenyapkan konsep dan pengertian yang membahayakan kekuasaan rezim orde baru, (2) pemroduksian bahasa yang dapat menyudutkan kekuatan lain. Penciptaan bahasa ini akan berdampak buruk pada orang yang tidak disukai kekuasaan, (3) memproduksi konsep yang dapat mengerem dan menurunkan emosi masyarakat sewaktu berhadapan dengan realitas tertentu yang tidak sesuai dengan kekuasaan, dan (4) penyeragaman bahasa dan istilah yang digunakan oleh pejabat aparatur negara. Penyeragaman ini bertujuan untuk menghindari perbedaan konsep yang dapat mengganggu kemapanan (Suroso, 2001)

Bahasa selain dijadikan ajang opeasi kekuasaan, di sisi lain dapat dipakai untuk menelanjangi permainan kekuasaan dan ideologi. Bukti empirik yang dapat digunakan untuk mendukung pendapat di atas adalah pemakaian kosakata yang digunakan orde lama sperti revolusi dan kontrarevolusi, nekolim, antek-antek kapitalis-imperalisme, nasakom, indoktrinasi, marhen, dan berdikari dan pemakaian kata yang digunakan rezim orde baru seperti pembangunan dan anti pembangunan, besih lingkungan, gerakan pengacau keamanan, Organisasi tanpa Bentuk, ekstrim Kiri/kanan, Golongan frustasi, stabilitas nasonal, dll (Rahmat, 1995)

Eufemisme Bahasa dan pemantapan Citra

 Fowler (1996) mendefinisikan bahwa “euphemism is the use of mild or periphastic expression as substitute for blunt precision or disagreable” pemakaian suatu uangkapan yang lembut, samar, atau berputar-putar untuk menggantikan presisi yang kasar, atau suatu kebenaan yang kurang enak. Definisi Fowler tersebut tampaknya sesuai praktik eufemisme yang digunakan penguasa Indonesia untuk memantapkan citra berkaitan dengn kebanran yang busuk. Contoh: Tingkat ekonomi Indonesia membaik (siapa yang menikmati) , Aparat mengamankan demonstran anti kenaikan BBM (menangkap dan mungkin menggebugi), Utang luar negeri dianggap bantuan, Pelacur diganti Pekerja Seks Komersial, .

Menurut Kleden (1998) bahwa eufemisme dapat menggambarkan norma-norma terselubung estetis baik untuk pelanggaran moral maupun untuk kenyatan sosial yang pahit. Ucapan Kleden tesebut senada dengan pernyataan Anderson (1990), ambiguitas bahasa yang digunakan lewat bahasa para petinggi negara bukan hanya menyembunyikan atau menciptakan realitas, tetapi juga bersembunyi dari realitas dan perilaku yang sesungguhnya.

Pemerintah SBY suka menggunakan bahasa eufemisme yang terselubung. Dalam kasus aktual korupsi yang melanda Partai Demokrat menyatakan bahwa Korupsi yang dilakukan Partai Demokrat masih kecil, dibandingkan dengan Partai lain, tetapi dia tidak mau menyebut partai apa. Logikanya, korupsi bisa terjadi di mana saja, paahal dalam kampanye pemilian Presiden 2009-2014, dia menyatakan orang yang paling depan dalam membeantas korupsi. Nyatanya dalam periode kedua kepemimpinan SBY korupsi semakin marak.

Dadam memproduksi kata-kata untuk membangun kekuasaan, rezim penguasa biasanya melakukan (1) pemasyarakatan bahasa seperti jabatan adalah amanah, pengentasan kemiskinan, negara kita adalah negara hukum, tidak ada yang kebal hukum, pemerataan pendapatan, Pancasila, UUD 45, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika, (2) memperkasar untuk menangkal kekuatan lawan politik, misalnya SARA (suku, agama, ras, antar golongan), subversif, aktor intelektual, (3) memproduksi kata-kata yang dapat mengerem dan menurunkan emosi masyrakat, seperti mendhem jero mikul dhuwur, jer basuki mawa bea (Bagi mereka yang ingin sekolah gratis), demi kepentingan umum (Lady Gaga dilarag pentas di Indonesia, Irsjad manji dilarang diskusi di Kampus), dan (4) penyeragaman bahasa atau istilah yang dipakai oleh pejabat. Contoh demonstrasi tidak dilarang tetapi ada ijin dan tidak rusuh, bebaskan rakyat dari ketakutan (nyatanya banak yang masih akut), dll.

Organisasi, Lembaga, Institusi, dan Penguasa, mencoba mengkonsolidasikan kekuasaannya dengan memproduksi bahasa yang dapat mengundang simpati dan dukungan. Namun penggunaan eufemisme dan pencitraan, sudah seharusnya dilawan dengan mendekonstruksi pemakaian bahasa secara transparan dan menerapkan eterbukaan dalam melaksanakan public relaton atau kehumasan, sehingga masyarakat mendapatkan makna yang sesungguhnya. Namun juga dicatat, bahasa itu bukan matematika, kadang tidak hanya logika yang berbicara, tetapi rasa.

**Daftar Pustaka**

Eriyanto (2000) Analisis Wacana Pengantar Analisis Teks Media. Yogyakarta: LkiS.

Fowler, Roger (1996) Language in the News Dscourse aand Ideology in the Press. London: Routledge.

Latif, Yudi dan Idi Subndy Ibrahim (1996) Bahasa dan Kekuasaan Politik Wacana di Pangung Orde Baru. Bandung: Mizan Kronik Indonsia Baru.

Suroso (2000) Menuju Pers Demokratik. Kritik atas Profesionalisme Wartaan. Yogyakarta: LSIP.